

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Bridgman, R. (2004). Criteria for Best Practices in Building Child-Friendly Cities: Involving Young People in Urban Planning and Design. *Canadian Journal of Urban Research* 13 (2), 337- 346.
- Budiman, H. (2017). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 31–43.
- Bupati Kabupaten Magelang. (2016). Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak. Magelang: Pemda Kabupaten Magelang.
- Bupati Kabupaten Magelang. (2012). Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Magelang. Magelang: Pemda Kabupaten Magelang.
- Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Edward III & George, C. (1984). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi. *Journal of public policy and management review*, 5(2), 55-70.
- Fadlurrahman, F., Nugraha, J. T., & Claudia, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 43-54.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Heryana, A. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Prodi Kesehatan Masyarakat*. Universitas Esa Unggul.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). **PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 2023**. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4631/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2023>. Diakses pada: 23 November 2023.
- Karsten, L & Vliet, W. V. (2006). Children in the City: Reclaiming the Street. *Children, Youth and Environments*. 16(1). 151-167.

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pub. L. No. 11 (2011).
- Lukman, D. M. (2018). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu). Universitas Brawijaya.
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 36-52.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/kota Layak Anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*. United States Of America : Sage Publications.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. (2017). Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Magelang: Pemda Kabupaten Magelang.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pub. L. No. 11 (2011).
- Prabowo, M. I. A. (2018). Respons Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Kampung Ramah Anak Di Kampung Rotowijayan, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: Pemerintah Pusat.

- Ratri, Dewi Kartika. (2014). Jurnal Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Jurnal Ilmu Pemerintahan UB. 4-7.
- Riggio, E. (2002). Child friendly cities: good governance in the best interest of the child. *Environment and Urbanization* 14(2). 45-58.
- Simatupang, Patar., & Haedar, A. (2011) Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*. 2(1).
- Siskasari, A., Darumurti, A., & Permatasari, A. (2020). Sinergitas Pemerintah, Swasta dan Civil Society dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 147-158.
- Subiyakto, R. (2012). Membangun kota layak anak: Studi kebijakan publik di era otonomi daerah. *Sosio Religia*, 10(1), 49-71.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Sutarman. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- United Nations International Children's Emergency Fund. (2018). *Child Friendly Cities and Communities Handbook*. New York: UNICEF.
- Verina, Vinda., Dwiki B.P., & Merintha S. (2023). Kabupaten Layak Anak : Kebijakan dalam Melindungi Hak Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 6(1), 43-46.
- Wahab, Solichin A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansyah. (2022). *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*. Semarang : Program Studi Doktor Administrasi Publik
- Widiyanto, Dodi., & R. Rijanta. (2012). Lingkungan Kota Layak Anak (Child Friendly City) berdasarkan Presepsi Orangtua di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Lestari*, 12(2), 211-216.



Widodo, Joko. (2009). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Jakarta : Media Pressindo.

Wulczyn, F., Daro, D., Fluke, J., Feldman, S., Glodek, C., & Lifanda, K. (2010). Adapting a systems approach to child protection: Key concepts and considerations. New york: UNICEF.